

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini masih tumbuh stabil di tengah tantangan global, dengan angka pertumbuhan sekitar 5,11% hingga triwulan pertama 2024 (BPS, 2024). Salah satu penyokong utama adalah sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk mendorong stabilitas ekonomi, salah satunya melalui peningkatan daya beli dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi asing (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024).

Selain sektor-sektor formal yang tercatat dan diatur oleh pemerintah, sektor informal juga menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Sektor ini menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak terserap oleh sektor formal, terutama di daerah pedesaan dan wilayah perkotaan dengan akses terbatas. Sektor informal mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan kecil, usaha rumahan, dan layanan jasa mandiri yang dijalankan secara individu atau kelompok kecil. Peran sektor informal dalam ekonomi nasional tidak dapat diremehkan. Di banyak negara berkembang, sektor ini menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih lanjut, sektor informal sering bertindak sebagai jaring pengaman sosial dalam masa-masa ekonomi yang sulit, menyediakan barang dan jasa yang terjangkau bagi lapisan masyarakat yang

nampu dan menawarkan peluang pekerjaan ketika sektor formal ni kontraksi (Ria Andiki Powatu, 2015).



Menurut data terbaru dari (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024) jumlah pekerja di sektor informal mencapai 75,2 juta orang, atau sekitar 55,8% dari total angkatan kerja yang berjumlah 134,8 juta orang. Sementara itu, sebanyak 59,6 juta pekerja atau sekitar 44,2% bekerja di sektor formal. Dominasi sektor informal menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi tumpuan bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk memasuki sektor formal. Sektor informal juga berkontribusi dalam menyokong perekonomian masyarakat kelas bawah, meskipun tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan perlindungan sosial masih menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pekerja Sektor Formal dan Informal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023

Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota (Jiwa)					
	Formal			Informal		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kep. Selayar	29.250	28.361	29.881	40.272	43.675	47.609
Bulukumba	61.989	55.699	74.653	143.943	155.081	170.302
Bantaeng	25.015	33.211	31.027	78.240	73.722	83.515
Jeneponto	39.219	46.046	50.578	144.709	161.277	155.420
Takalar	59.757	49.429	59.372	86.034	96.510	89.847
Gowa	150.834	141.227	146.924	239.206	283.716	262.957
Sinjai	36.529	33.486	39.797	92.390	81.897	95.591
	68.756	73.613	87.014	81.777	85.159	93.616



Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota (Jiwa)					
	Formal			Informal		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pangkep	69.077	78.425	83.470	86.358	104.751	95.210
Barru	31.292	34.725	38.548	41.705	45.240	46.248
Bone	100.191	107.972	113.953	267.841	279.904	276.918
Soppeng	32.579	37.640	39.011	72.066	73.375	69.803
Wajo	54.687	54.367	55.300	146.307	140.816	139.594
Sidrap	46.196	47.271	49.730	85.165	84.798	85.325
Pinrang	54.714	54.013	64.374	104.000	108.092	121.049
Enrekang	24.509	25.656	27.472	83.027	84.072	91.531
Luwu	41.884	51.340	66.125	121.387	124.672	122.316
Tana Toraja	15.023	24.774	36.068	115.460	120.293	142.823
Luwu Utara	36.783	48.768	41.578	104.245	116.303	123.789
Luwu Timur	56.562	59.557	55.458	97.568	94.683	93.321
Toraja Utara	27.258	24.534	30.000	89.454	89.809	121.165
Makassar	381.994	389.921	357.794	247.939	253.447	224.914
Pare Pare	38.859	38.044	41.911	30.918	29.860	30.611
Palopo	46.390	48.693	51.888	31.075	35.726	35.583
Sulawesi	1.529. 347	1.586. 772	1.671. 926	2.631. 086	2.766. 878	2.819. 057

Sumber: (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024)



Sulawesi Selatan menunjukkan struktur ketenagakerjaan yang mencolok dengan 1.671.926 pekerja formal, yang mewakili 37,3% dari total 4.491.983 pekerja di provinsi, sedangkan sektor informal mencatat 2.819.057 pekerja, setara dengan 62,7% dari total pekerja (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024). Hal ini menggambarkan bahwa sektor informal mendominasi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan, mencakup berbagai jenis pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi, seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan pengrajin. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan dalam sektor formal, sektor informal tetap menjadi sumber utama lapangan pekerjaan bagi masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Sulawesi Selatan dan berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar UMKM beroperasi dalam sektor informal, sehingga menyerap lebih dari 95% tenaga kerja di sektor ini. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian lokal dengan memberikan produk dan jasa yang dibutuhkan, meningkatkan daya saing daerah, serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak. Dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi, UMKM berpotensi mendukung program-program pembangunan yang diusung oleh pemerintah daerah, sehingga memperkuat posisi mereka dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah juga terus berupaya mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk digitalisasi, agar lebih berdaya saing dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Program pemerintah seperti dukungan pembiayaan KUR dan bantuan

telah diterapkan untuk memperkuat peran UMKM, khususnya di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di daerah (Limanseto, 2022).



Di Kota Makassar, UMKM berperan penting sebagai salah satu pilar ekonomi lokal, menyediakan banyak lapangan kerja, dan mendukung perekonomian daerah. Pemerintah Kota Makassar terus mengupayakan pemberdayaan UMKM melalui berbagai program pelatihan dan inkubator bisnis, yang memungkinkan para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, berinovasi, serta beradaptasi dengan tren pasar, termasuk pasar global. Program-program seperti ini sangat membantu UMKM di Makassar untuk bersaing, baik di level nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan teknologi informasi yang mempermudah akses pasar yang lebih luas (News, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persaingan usaha berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan UMKM, yang menunjukkan bahwa semakin banyak usaha yang memiliki kesempatan untuk bersaing di dunia usaha, semakin besar kemungkinan mereka untuk berkembang dan bertahan (Herman & Nohong, 2022).

Keberagaman UMKM di Makassar dapat dilihat dari banyaknya kawasan perdagangan, baik tradisional maupun modern, yang tersebar di seluruh kota. Pasar tradisional seperti Pasar Gowa, Pasar Somba Opu, dan Pasar Terong menjadi pusat perkembangan UMKM di sektor perdagangan barang dan makanan. Selain itu, pusat perbelanjaan modern seperti Mall Panakkukang, Mall Trans Studio, dan Mall Ratu Indah juga memberikan ruang bagi UMKM dalam sektor ritel dan mode. Lebih jauh lagi, potensi sektor pariwisata di Makassar membuka peluang bagi pengembangan UMKM di bidang kerajinan, kuliner, dan layanan wisata. UMKM di kota ini berhasil menciptakan identitas unik melalui produk-produk lokal, seperti tenun tradisional, makanan khas, dan kerajinan etnik yang menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun internasional.



Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait, berupa pelatihan, bimbingan, dan akses ke pasar, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta kontribusinya dalam memajukan perekonomian Makassar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, total jumlah UMKM di seluruh kecamatan di Makassar mencapai 22.070.

Tabel 1. 2 Penyebaran UMKM di Kota Makassar

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Biringkanaya	2.506
2	Bontoala	945
3	Kep Sangkarrang	324
4	Makassar	1.623
5	Mamajang	1.498
6	Manggala	2.910
7	Mariso	1.114
8	Panakkukang	1.232
9	Rappocini	1.781
10	Tallo	1.038
11	Tamalanrea	1.647
12	Tamalate	3.368
13	Ujung Pandang	707
14	Ujung Tanah	814
15	Wajo	563
Total		22.070

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, 2023

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa di Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea menempati posisi penting dengan jumlah UMKM yang mencapai 1.647 unit dari total 22.070 UMKM yang ada di kota tersebut. Keberadaan UMKM



di Kecamatan Tamalanrea mencerminkan dinamika perekonomian yang aktif dan signifikan yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan

angka yang signifikan ini, UMKM berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, memperkuat basis produksi, dan memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan. Namun, dibalik potensi besar ini, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang efektif. Banyak pelaku UMKM masih memiliki pemahaman terbatas tentang dasar-dasar keuangan, seperti manajemen arus kas, pengelolaan utang, dan perencanaan investasi. Literasi keuangan yang rendah ini membuat mereka cenderung mengambil keputusan keuangan yang kurang optimal dan kurang mampu mengelola risiko finansial, yang akhirnya menghambat perkembangan bisnis mereka. Selain pemahaman, perilaku keuangan juga menjadi tantangan. Beberapa pelaku UMKM mungkin memiliki kebiasaan finansial yang tidak mendukung keberlanjutan bisnis, seperti terlalu bergantung pada pinjaman tanpa strategi pengelolaan utang yang matang atau pengeluaran yang tidak terencana. Kebiasaan ini mempengaruhi stabilitas keuangan bisnis mereka. Karena keterbatasan dalam literasi dan perilaku keuangan, banyak pelaku UMKM yang merasa kurang puas dengan kondisi finansial mereka. Kepuasan finansial yang rendah ini juga berdampak pada motivasi mereka dalam mengembangkan usaha serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi atau krisis finansial (Naomi Sitompul et al, 2024).

Literasi keuangan (*financial literacy*) merupakan aspek fundamental yang memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka. Tingkat literasi keuangan yang rendah sering kali menjadi penghalang bagi pelaku UMKM untuk mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki. Literasi keuangan yang mencakup pengetahuan mengenai anggaran, manajemen arus kas, dan

investasi, sangat penting agar pelaku UMKM dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan siap menghadapi perubahan pasar serta risiko



eksternal. Peningkatan literasi keuangan akan membantu UMKM dalam pengambilan keputusan finansial yang lebih tepat, seperti manajemen utang, pengelolaan risiko, dan akses ke sumber daya finansial yang memadai (Markonah et al., 2024).

Sebagai landasan untuk program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Data INDEF tahun 2023 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62%, yang paling rendah dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN yang mencapai 70%. Menurut Darwisman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), masih ada ruang untuk peningkatan layanan literasi dan inklusi keuangan untuk mencapai target literasi keuangan sebesar 90%. Dalam membantu kemajuan Indonesia secara keseluruhan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan akses keuangan telah menjadi prioritas utama pemerintah. Sangat penting untuk membangun literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami pengelolaan keuangan melalui literasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami produk keuangan, termasuk layanan fintech. Meskipun penggunaan teknologi finansial terus meningkat, rendahnya literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat masih bingung membedakan produk fintech legal dengan yang ilegal. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menekankan pentingnya peningkatan

agar masyarakat dapat memilih produk keuangan yang sesuai dan jri dari potensi penipuan fintech ilegal. Selain itu, masyarakat juga masih



membutuhkan edukasi mengenai keamanan data dan pemahaman akan suku bunga, terutama dalam fintech berbasis pinjaman (Komunikasi BI, 2021).

Perilaku pengelolaan keuangan (*financial management behavior*) juga merupakan faktor kunci yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Perilaku pengelolaan keuangan yaitu keterampilan individu dalam perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengendalian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Kebiasaan dan sikap pelaku UMKM dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran sehari-hari dapat mencerminkan seberapa baik mereka dalam mengelola keuangan usaha. Pelaku UMKM yang menerapkan perilaku keuangan yang baik, seperti disiplin dalam menabung, pengelolaan utang yang bijaksana, dan penggunaan dana yang efisien, akan merasakan tingkat kepuasan finansial yang lebih tinggi. Kepuasan finansial bukan hanya mengenai seberapa banyak pendapatan yang diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana pelaku UMKM merasa aman dan nyaman dalam mengelola keuangan mereka. Dengan perilaku pengelolaan keuangan yang positif, pelaku UMKM akan mampu merencanakan masa depan usaha mereka dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing di pasar. Studi (Rusnawati, Rusdi. R, 2022) membahas tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Makassar, termasuk masalah pengelolaan keuangan dan kecenderungan mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha, belum sepenuhnya memahami manajemen modal kerja, perencanaan keuangan, serta investasi yang efektif, sehingga menghambat pelaku UMKM dalam menilai keuntungan usaha secara tepat dan menghambat efisiensi operasional bisnis.

Ketahanan keuangan (*financial resilience*) bagi pelaku UMKM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat literasi keuangan (*financial* dan perilaku pengelolaan keuangan (*financial management behavior*)

Tingkat literasi keuangan yang baik memungkinkan pelaku UMKM untuk



mengelola dan merencanakan keuangan secara lebih efektif yang membantu dalam mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan potensi keberhasilan usaha mereka. Sementara itu, perilaku pengelolaan keuangan yang disiplin, seperti pengelolaan utang yang bijaksana dan konsistensi dalam menabung, berkontribusi positif terhadap kepuasan finansial secara keseluruhan, yang pada akhirnya memengaruhi mereka dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis (Meiyola Krisma Agatha et al., 2023). Ketahanan finansial mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengelola keuangan mereka dengan baik dan menghadapi situasi keuangan yang sulit secara efektif guna mencapai tujuan jangka panjang. Ini mencakup kemampuan untuk menghadapi tantangan keuangan yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, inflasi, dan resesi ekonomi. Individu yang memiliki tingkat ketahanan finansial yang tinggi dapat mengendalikan pengeluaran, menggunakan tabungan dengan bijak, menghindari utang yang tidak perlu, serta memiliki rencana keuangan jangka panjang.

Pelaku UMKM sangat penting memiliki ketahanan keuangan untuk memastikan keberlangsungan usaha mereka di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah. Dengan strategi manajemen keuangan yang tepat dan peningkatan literasi keuangan, UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang meskipun dalam situasi sulit. Banyaknya pelaku UMKM di Kecamatan Tamalanrea yang menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola keuangan usaha mereka, seperti kurangnya literasi keuangan dan perilaku pengelolaan yang kurang baik dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional, serta membatasi potensi pengembangan usaha mereka. Kondisi ini berpotensi menghambat kontribusi UMKM terhadap

lahan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mediasi



Financial Management Behavior pada hubungan antara *Financial Literacy* dan *Financial Resilience* pada Pelaku UMKM Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Literacy* berpengaruh secara langsung terhadap *Financial Resilience* pelaku UMKM Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
2. Apakah *Financial Management Behavior* berpengaruh secara langsung terhadap *Financial Resilience* pelaku UMKM Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?
3. Bagaimana peran mediasi *Financial Management Behavior* dalam hubungan antara *Financial Literacy* dan *Financial Resilience* pelaku UMKM Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Financial Resilience* pelaku UMKM Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Management Behavior* terhadap *Financial Resilience* pelaku UMKM Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.



3. Untuk mengetahui peran mediasi *Financial Management Behavior* dalam hubungan antara *Financial Literacy* dan *Financial Resilience* pelaku UMKM Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pada bidang Manajemen Keuangan dan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai karakteristik dan pola perilaku pengelolaan keuangan pelaku UMKM dan bagaimana mereka ini dapat berperan penting dalam mengatasi tantangan ekonomi. Sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan topik yang sudah maupun yang belum diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama di perkuliahan tentang manajemen keuangan, manajemen risiko, dan makroekonomi.

2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bentuk sumbangan pemikiran terkait strategi dan cara mengelola keuangan serta pentingnya literasi keuangan dan



perilaku pengelolaan keuangan untuk kepuasan keuangan pelaku UMKM.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi pada pengembangan studi terkait penelitian di bidang Manajemen Keuangan, khususnya tentang pengaruh literasi keuangan dan perilaku pengelolaan keuangan pelaku UMKM terhadap ketahanan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Penelitian ini akan mencakup berbagai jenis usaha yang dikelola oleh pelaku UMKM, termasuk perdagangan, jasa, dan industri kecil. Fokus penelitian akan menilai tingkat literasi keuangan, perilaku pengelolaan keuangan, dan kepuasan finansial para pelaku usaha.

1.6 Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Maka penulis menyusun sistematika penulisan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan tentang landasan teori yang mendukung penelitian dan tinjauan empirik penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan terkait hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut (Pradiningtyas & Lukiastuti 2019), Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang berkembang pada tahun 1967. Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Profesor Icek Ajzen. Berdasarkan teori ini, manusia berperilaku dengan cara yang masuk akal dengan memperhitungkan informasi yang tersedia, baik secara eksplisit maupun implisit yang akan menjadi pertimbangan mereka dalam bertindak, sehingga seseorang bertindak berdasarkan kontrol dari individu itu sendiri.

Dalam TPB menerangkan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. TPB dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang dan untuk semua perilaku secara umum niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*). *Attitude toward the behavior* merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. *Subjective norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidak menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan. *Perceived*



behavioral control adalah persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

TPB membangun keyakinan *self-efficacy* atau kontrol perilaku yang dirasakan dalam kerangka yang lebih umum dari hubungan antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku. Menurut teori perilaku terencana, kontrol perilaku yang dirasakan, bersama dengan niat perilaku, dapat digunakan secara langsung untuk memprediksi prestasi perilaku. Mempertahankan niat yang konstan, upaya yang dilakukan untuk membawa perilaku menuju kesimpulan yang sukses kemungkinan akan meningkat dengan kontrol perilaku yang dirasakan (Handoyo, 2022).

2.1.2 Literasi Keuangan (Financial Literacy)

Menurut Financial Corp (2014) dalam (Putra et al., 2023) Istilah literasi keuangan pertama kali diciptakan di Amerika Serikat pada tahun 1787, ketika John Adams dalam sebuah surat kepada Thomas Jefferson mengakui perlunya literasi keuangan untuk mengatasi kebingungan dan kesulitan yang meluas di Amerika yang muncul karena ketidaktahuan terhadap kredit, sirkulasi, dan sifat koin.

Literasi merupakan suatu istilah yang mempunyai arti berupa suatu kemampuan dalam berbahasa yang dipunyai oleh setiap individu manusia untuk melakukan komunikasi yang meliputi membaca, berbicara, menyimak serta kemampuan dalam menulis dengan pola yang berbeda beda sesuai dengan suatu tujuan yang hendak dicapainya. Sedangkan kata keuangan

mpunyai arti yaitu tentang mempelajari bagaimana seorang personal,ompok, bisnis, serta suatu organisasi atau perusahaan dalam upaya



untuk meningkatkan, mengalokasi, dan mempergunakan seluruh kemampuan komponen moneter yang dimiliki seiring putaran masa, serta dapat mengkalkulasikan tentang risiko pada permasalahan dan kegiatan bisnis yang dikelola oleh pemiliknya (Choeruddin Achmad, 2023).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam buku (Choeruddin Achmad, 2023) *financial literacy* merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai upaya peraihan dan peningkatan wawasan atau pemahaman (*knowledge*), keterampilan (*skill*), kepercayaan (*confidence*) pemakai, pelanggan serta manusia secara luas sehingga akan mampu untuk manajemen tentang keuangan dengan lebih baik dan optimal. Selain itu, menurut OJK memberikan penjelasan dan ilustrasi tentang visi literasi keuangan adalah upaya untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang tinggi dan baik agar masyarakat bisa memilih, memanfaatkan dan menggunakan produk serta jasa keuangan untuk mencapai dan menumbuhkan tingkat sejahtera pada mereka. Sedangkan, untuk literasi keuangan mempunyai misi adalah menjalankan pendidikan atau edukasi di sektor keuangan pada masyarakat Indonesia supaya bisa manajemen keuangan secara *smart*, meningkatkan akses informasi, dan pemakaian produk serta jasa keuangan dengan melakukan pengembangan infrastruktur yang mendukung *financial literacy*.

Peraturan OJK, Nomor 76/POJK.07/2016 menyatakan Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan

putusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai sejahteraan. Tujuan Literasi Keuangan, (a) meningkatnya kualitas



pengambilan keputusan keuangan individu; dan, (b) perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sedangkan ruang lingkup upaya peningkatan literasi keuangan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan (a) Edukasi Keuangan; dan (b) pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. (Nasution, 2019)

OJK-RI dalam (Choeruddin Achmad, 2023) membagi tingkatan literasi keuangan berupa 4 macam, antara lain berupa:

1. *Well Literate*: Dalam tingkatan ini seorang individu mempunyai wawasan atau pengetahuan yang cukup terkait keuangan. Misalnya mengenai produk atau jasa keuangan, serta memiliki kepercayaan terhadap lembaga jasa finansial. Dalam hal ini, tidak hanya sekedar mengetahui atau mengenai produk dan jasa keuangan tetapi mempunyai kemampuan dalam keterampilan yang cukup dalam menggunakan produk keuangan yang sudah ada, sehingga akan mampu membuat menjadi lebih baik dan sejahtera.
2. *Sufficient Literate*: Dalam tingkatan ini seseorang mempunyai pengetahuan dan keyakinan pada suatu lembaga jasa keuangan dan produk keuangan yang ada. Tingkat ini lebih mengenal segala resiko, kewajiban, dan manfaat pada produk finansial.

Less Literate: Dalam tingkatan ini seseorang individu hanya mempunyai wawasan dan pengetahuan mengenai produk, jasa, dan



lembaga. Akan tetapi, belum mengetahui bagaimana caranya mengelola serta memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang lebih baik.

4. *Not Literate*: Dalam tingkatan ini individu belum mampu dan cukup mempunyai wawasan dan pengetahuan serta keyakinan pada suatu produk, jasa, dan lembaga keuangan. Dengan kata lain, seorang individu tidak mempunyai keterampilan yang baik dalam mengelola keuangan miliknya.

Menurut Chen & Volpe, R. P., (1998) terdapat empat indikator untuk mengukur tingkat literasi keuangan yaitu: 1) Pengetahuan keuangan dasar, seperti kegunaan pengetahuan keuangan pribadi, pengetahuan aset bersih, pengetahuan pengeluaran dan pendapatan, pengetahuan perencanaan keuangan pribadi; 2) Pengetahuan Tabungan dan pinjaman, seperti karakteristik, manfaat, dan jenis simpanan dan pinjaman, suku bunga, kartu kredit; 3) Pengetahuan Asuransi, seperti pemahaman umum terkait asuransi, premi, jenis dan manfaat asuransi; 4) Pengetahuan Investasi, seperti pengetahuan jenis investasi, manfaat dan tujuan investasi, serta risiko investasi (Cakranegara & Fetesond, 2022).

2.1.3 Perilaku Pengelolaan Keuangan (Financial Management Behavior)

Perilaku pengelolaan keuangan dianggap sebagai salah satu aspek krusial dalam bidang keuangan. Berbagai definisi telah diajukan terkait dengan konsep ini. Misalnya, Mien dan Thao (2015) menyatakan bahwa perilaku keuangan mencakup penentuan, akuisisi, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Secara lebih luas, mereka menggambarkan



perilaku manajemen keuangan sebagai proses pengambilan keputusan yang mengharmonisasikan kepentingan individu dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen keuangan sangat terkait dengan efektivitas pengelolaan dana.

Financial management behavior is a person's ability to organize, namely planning, budgeting, checking, managing, controlling, searching and storing daily financial funds. The emergence of financial management behavior is the impact of a person's desire to make ends meet in accordance with the level of income earned (Kholilah & Iramani, 2013). Dengan menerapkan perilaku pengelolaan keuangan yang efisien, individu dapat memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal dan mencapai keamanan serta stabilitas finansial. Ini mencakup kegiatan seperti menyusun anggaran, memantau pengeluaran, menabung untuk kebutuhan darurat dan tujuan jangka panjang, serta berinvestasi secara bijak. Secara keseluruhan, perilaku pengelolaan keuangan merupakan elemen penting dalam keuangan pribadi yang dapat memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan finansial individu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Sutrisno (2008), manajemen keuangan dapat dipahami sebagai semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh dana dengan biaya yang rendah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilaku manajemen keuangan antara lain:



1. Kepribadian: Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan.
2. Literasi keuangan: Pemahaman yang baik tentang literasi keuangan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya, sehingga memengaruhi perilaku manajemen keuangannya.
3. Budaya dan lingkungan: Lingkungan sosial dan budaya di sekitar individu dapat memengaruhi cara mereka mengelola keuangan. Misalnya, jika seseorang berada dalam lingkungan yang konsumtif, ia cenderung mengikuti pola tersebut.
4. Pengalaman: Pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak pada perilaku manajemen keuangan di masa mendatang.
5. Tingkat pendapatan: Pendapatan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangannya. Umumnya, semakin tinggi pendapatan, semakin baik pengelolaan keuangannya, meskipun tidak selalu demikian karena perilaku konsumtif juga bisa muncul pada individu berpendapatan tinggi.
6. Tujuan keuangan: Memiliki tujuan keuangan yang jelas dapat mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya agar dapat mencapai tujuan tersebut.



7. Kepercayaan diri: Tingkat kepercayaan diri dalam mengelola keuangan juga memengaruhi perilaku manajemen keuangan. Individu yang percaya diri cenderung lebih berani mengambil keputusan berisiko yang dapat memberikan keuntungan lebih besar, tetapi jika terlalu percaya diri, hal ini bisa menjadi risiko karena bisa menyebabkan optimisme berlebihan dan pengambilan risiko yang tidak bijaksana.

Menurut Xiao & Dew (2011), indikator perilaku manajemen keuangan dibagi menjadi empat kategori, yaitu: pengelolaan arus kas, tabungan dan investasi, konsumsi, serta pengelolaan pinjaman dan kredit.

1. Pengelolaan arus kas

Mengacu pada kemampuan individu dalam mengatur arus kas masuk dan keluar, termasuk dalam hal mengelola dan memantau pengeluaran bulanan, pengeluaran tak terduga, serta pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.

2. Tabungan dan investasi

Mencakup kemampuan seseorang untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk tujuan tabungan atau investasi jangka panjang yang dapat memberikan keuntungan finansial.

3. Konsumsi

Merujuk pada kebiasaan dan pola pengeluaran individu saat membeli barang atau jasa. Pola konsumsi yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan kesulitan keuangan.

4. Pengelolaan pinjaman dan kredit

Berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengatur pembayaran cicilan pinjaman atau kredit, termasuk usaha untuk



menghindari utang yang tidak terbayar dan menyelesaikan utang tepat waktu.

2.1.4 Ketahanan Keuangan (Financial Resilience)

Ketahanan Finansial (Financial Resilience) dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menghadapi dan mengatasi peristiwa dalam hidup yang memengaruhi pendapatan atau aset mereka (Klapper, L., & Lusardi, A., 2020). Montoro dan Rojas-Suarez (2012) meneliti ketahanan ekonomi dan keuangan pada tingkat nasional, berargumen bahwa kekuatan ekonomi yang lebih besar meningkatkan kemampuan untuk menghadapi krisis. Mereka mengidentifikasi dua dimensi ketahanan keuangan yang juga relevan bagi pemerintah daerah. Dimensi pertama adalah kemampuan untuk menangani dampak dari guncangan finansial. Dimensi kedua berkaitan dengan kemampuan untuk merespons secara efektif dan menerapkan kebijakan dengan cepat (Indiwo & Setyorini, 2020).

Dari perspektif bisnis, Reeves dan Whitaker (2020) mendefinisikan ketahanan sebagai kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan tekanan keuangan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan (adaptif). Ketahanan finansial memerlukan kapasitas adaptif, yang berarti kemampuan untuk bertindak dan mencapai tujuan secara mandiri (Folke et al., 2010). Selain itu, ketahanan finansial juga dapat dilihat dalam konteks ekonomi nasional, bukan hanya pada tingkat individu. Pendapatan bukan satu-satunya elemen yang memengaruhi ketahanan finansial, seseorang juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola aset likuid, menyediakan dana urut, dan melakukan analisis yang baik saat mengajukan pinjaman (Rayah et al., 2022).



Setiap individu sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko kehilangan pekerjaan, penyakit yang memburuk, cedera, biaya tinggi untuk rumah dan kendaraan, serta penurunan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Oleh karena itu, ketahanan finansial menjadi sangat penting untuk bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dan tantangan hidup. Menurut Berbara et al. (2017), memiliki ketahanan keuangan dapat sangat membantu seseorang dalam menghadapi krisis. Namun, untuk dapat bertahan dalam situasi tersebut, individu perlu memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, pengetahuan keuangan yang memadai juga diperlukan agar dapat mengelola uang dengan lebih efektif dan menempatkannya di tempat yang tepat. Montoro dan Suarez (2012) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan finansial, yaitu:

- a. Kondisi arus kas
- b. Rasio utang
- c. Dana darurat
- d. Proteksi kesehatan dan jiwa

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) Bab I Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan



merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) dalam pasal 6 bab IV adalah sebagai berikut:

1. Kriteria usaha kecil antara lain sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil antara lain sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).



3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha kecil dan menengah (UKM) didirikan oleh individu atau kelompok dan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan UKM berdasarkan nilai aset dan omzet dalam rupiah. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menyediakan data statistik (Mursalim Nohong et al., 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Yolanda, 2024) memberikan definisi yang lebih spesifik tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang. Sementara itu, Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang. Definisi ini memberikan parameter yang lebih terukur dalam mengklasifikasikan UKM berdasarkan skala dan kapasitas kerja. Hal ini memungkinkan pemerintah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing jenis UKM.

ain itu, definisi ini juga membantu dalam menyusun strategi pengembangan dan pemetaan potensi UKM dalam perekonomian nasional,



yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, definisi BPS tentang UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja menjadi landasan yang penting dalam upaya memahami dan mendukung sektor UKM di Indonesia.

Lestari (2020) dalam (Octavina & Rita, 2021) menyatakan bahwa jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha kuliner: Salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang yang bergerak dibidang makanan. Bisnis kuliner tergolong bisnis yang mudah dilakukan karena hanya menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman tanpa melalui tahap promosi.
2. Usaha bidang fashion: Bisnis yang dapat memberikan keuntungan besar karena sampai kapanpun fashion akan tetap menjadi kebutuhan banyak orang.
3. Usaha bidang Pendidikan: Usaha dibidang pendidikan merupakan salah satu jenis UMKM yang masih sangat terbuka peluangnya. Sebagaimana saat ini bahwa pendidikan sangat menjadi prioritas.
4. Usaha bidang otomotif: Salah satu membuka usaha di bidang otomotif bisa menjadi pilihan yang tepat bagi pemilik usaha. Usaha yang dilakukan dengan membuka toko penjualan spare part, atau membuka jasa pencucian motor dan mobil, atau perlengkapan safety riding misalnya helm, jaket dan sarung tangan berstandar SNI.
5. Usaha agrobisnis: Bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya.



6. Usaha bidang teknologi internet: Usaha yang berbagai jenis informasi dan konten-konten yang informatif dan menghibur yang diperoleh melalui internet.
7. Usaha kerajinan tangan: Usaha ini hanya membutuhkan modal kreativitas dan inovasi.
8. Usaha elektronik dan gadget: Jenis usaha dengan adanya perangkat canggih pendukung teknologi.

2.2 Tinjauan Empirik

Pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu yang merupakan landasan penting dalam penyusunan penelitian ini. Mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tinjauan Empirik

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Agillia Trisky Intansari, 2024)	Pengaruh <i>Locus of Control</i> , <i>Financial Resilience</i> , dan Pendapatan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan dengan	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan <i>Locus of Control</i> terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, pengaruh positif dan signifikan <i>Financial Resilience</i> terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, pengaruh positif dan signifikan Pendapatan



No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Literasi Keuangan Syariah sebagai Variabel Moderating		terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan, dan Literasi Keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh <i>Locus of Control</i> , <i>Financial Resilience</i> , dan Pendapatan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan.
2.	(Nike Apriyanti, Hariswijayanti, dan Shinta Bella, 2024)	<i>Financial Resilience: Strategies For Building A Strong Money Foundation</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>financial literacy</i> dan <i>financial planning</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial resilience</i> .
3.	(Sella, 2024)	Pengaruh <i>Financial Literacy</i> can <i>Financial Self-Efficacy</i> terhadap <i>Financial Management Behavior</i> Pengguna <i>Paylater</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Financial Literacy</i> dan <i>Financial Self-efficacy</i> berpengaruh positif secara parsial maupun simultan terhadap <i>Financial Management Behavior</i> pengguna <i>Paylater</i> .



No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	(Meyola Krisma Agatha, Nurfadilah, Rizki Luthfi Auliav, dan Maria Yovita R. Pandin, 2023)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan terhadap <i>Financial Resilience</i> pada UMKM	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap <i>financial resilience</i> pada UMKM untuk meningkatkan perilaku mengelola keuangan usaha dengan baik untuk kesejahteraan finansial.
5.	(Alinda Dwi Jofanka, Shofiatus Sa'diyah, Farah Estianingtyas, dan Maria Yovita R. Pandin, 2023)	Pengaruh Kecerdasan dan Literasi Keuangan terhadap Ketahanan Keuangan UMKM Di Sentra Wisata Kuliner Jambangan Surabaya	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan literasi keuangan memiliki dampak yang cukup sebesar 57,1% terhadap ketahanan keuangan UMKM di Sentra Wisata Kuliner Jambangan, Surabaya.
6.	(Hana mayanti rihoran,	Peranan Finansial Teknologi,	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa finansial teknologi



No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Cindy Septiana Rahayu, Irma Nur Fadlia, dan Maria Yovita R. Pandin, 2023)	Perilaku Keuangan Terhadap Ketahanan Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAG Surabaya		memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan keuangan mahasiswa. Finansial Teknologi mempermudah akses keuangan dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
7.	(Anisa Nur Khovivah dan Hetty Muniroh, 2023)	Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Kepribadian terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Rembang	Kuantitatif	Temuan ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, sikap keuangan dan Kepribadian berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Rembang.
8.	(Andira Sucianah dan Indrawati Hertiana, 2021)	Gender Moderasi <i>Financial Literacy</i> Dan <i>Financial</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi keuangan suatu keluarga, maka meningkatkan



No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Behavior</i> terhadap Ketahanan Keuangan Rumah Tangga Milenial selama Pandemi Covid-19		ketahanan keuangan suatu keluarga dan semakin baik perilaku keuangan yang dimiliki suatu keluarga maka meningkatkan ketahanan keuangan suatu keluarga.
9.	(Saraswati Mursali, 2021)	Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Pengalaman Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Sektor Informal (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Kota Manado, Sulawesi Utara)	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Pengalaman Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Perilaku Pengelolaan Keuangan. Sebesar 62,8 persen variasi dalam variabel perilaku pengelolaan keuangan dijelaskan oleh variasi dalam variabel pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan pengalaman keuangan yang digunakan dalam model ini, sisanya sebesar 37,2 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain.



No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	(Fanisa Kris Dayanti, Jeni Susyanti, dan Khoirul Anwarodin Broto, 2020)	Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Keuangan, dan Sikap Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha UMKM Fashion di Kab. Malang	Kuantitatif	Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Literasi Keuangan, Pengetahuan Keuangan, dan Sikap Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan. Secara parsial, masing-masing variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan.

